



## Transformasi Digital dalam Kebijakan Bantuan Sosial: Upaya Memperkuat Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Emi Citra Wulan<sup>1</sup>, Hendra Riofita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>1</sup>[emicitraulan@gmail.com](mailto:emicitraulan@gmail.com), <sup>2</sup>[hendrariofita@yahoo.com](mailto:hendrariofita@yahoo.com)

### Abstrak

Redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi penting pemerintah dalam ekonomi publik untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah program bantuan sosial. Namun, pelaksanaan bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan distribusi bantuan, serta lemahnya integrasi dan akurasi data. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas bantuan sosial dalam menjalankan fungsi redistribusi pendapatan. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah melakukan transformasi digital dalam pelaksanaan bantuan sosial guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial dalam memperkuat redistribusi pendapatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, laporan pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik, serta dokumen yang relevan dengan bantuan sosial dan digitalisasi layanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sistem penyaluran non-tunai, dan verifikasi berbasis digital mampu meningkatkan akurasi data penerima, efisiensi distribusi bantuan, serta transparansi pengelolaan program. Transformasi digital juga berkontribusi dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasi transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, optimalisasi sistem digital dan pembaruan data secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung efektivitas redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial di Indonesia.

**Kata Kunci:** Transformasi Digital, Kebijakan Bantuan Sosial, Redistribusi Pendapatan, Bantuan Sosial, Indonesia.

### 1. Latar Belakang

Pemerataan kesejahteraan melalui fungsi redistribusi pendapatan merupakan pilar utama dalam ekonomi publik untuk menekan ketimpangan sosial dan kemiskinan. Kebijakan bantuan sosial (*bansos*) menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut. Namun, efektivitas instrumen konvensional kerap terhambat oleh masalah tata kelola, seperti fenomena *exclusion* dan *inclusion error*, ketidakakuratan data penerima, hingga keterlambatan distribusi anggaran di lapangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arisyah dan Riofita [1], ketidaktepatan sasaran *bansos* berisiko mengurangi efisiensi fungsi redistribusi ekonomi makro dalam mengatasi masalah ketimpangan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, studi dari J. [2] juga menegaskan bahwa modernisasi kebijakan mutlak diperlukan guna memastikan penyaluran dana negara berjalan lebih akurat dan akuntabel bagi kesejahteraan masyarakat di era digital. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah mendorong transformasi digital dalam pengelolaan bantuan sosial melalui integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem penyaluran non-tunai. Sebagaimana dijelaskan oleh Santhia dan Lamabelawa [3], implementasi teknologi digital dalam pelayanan *bansos* terbukti mampu memotong rantai birokrasi, meningkatkan efisiensi administrasi, serta meminimalkan risiko manipulasi data di tingkat desa.

Di samping itu, transisi sistem digital yang masif memerlukan evaluasi mendalam terhadap keandalan infrastrukturnya. Sumayyah dan rekannya [4] menjelaskan bahwa integrasi data jaminan sosial yang akurat menjadi penentu utama dalam mengoptimalkan ekonomi publik demi tercapainya keadilan distribusi secara nasional. Sinergi antara pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran dan tata kelola yang adaptif menjadi kunci utama agar program jaminan sosial mampu meminimalkan kebocoran anggaran publik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengeksplorasi digitalisasi jaminan sosial, seperti studi yang dilakukan oleh Salsabila [5] yang mengkaji efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat. Namun, sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada aspek administratif teknis operasional dan pengawasan anggaran semata. Kajian literatur yang secara spesifik mengaitkan dampak transformasi digital bantuan sosial sebagai instrumen penguatan fungsi redistribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi publik masih sangat terbatas.

Untuk mengisi celah (gap) tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menempatkan digitalisasi bansos sebagai strategi makroekonomi dalam menekan ketimpangan pendapatan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis keandalan sistem digital dengan dampaknya terhadap keadilan distribusi ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran transformasi digital bansos dalam memperkuat redistribusi pendapatan di Indonesia sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial sebagai upaya memperkuat redistribusi pendapatan di Indonesia berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta berbagai sumber akademik lain yang berkaitan dengan bantuan sosial, transformasi digital, dan redistribusi pendapatan. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari sumber yang kredibel dan memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, yaitu transformasi digital bantuan sosial, efektivitas pelaksanaan program, serta perannya dalam memperkuat redistribusi pendapatan.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

## **3. Hasil dan Diskusi**

Transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial merupakan instrumen strategis ekonomi publik untuk mengoptimalkan distribusi anggaran negara. Bagian ini membahas efektivitas transisi sistem jaminan sosial di Indonesia melalui enam indikator utama. Analisis dalam bab ini berfokus pada perbandingan performa tata kelola konvensional dengan ekosistem digital, ketepatan instrumen perlindungan sosial, kapasitas operasional, hingga kendala struktural yang dihadapi di lapangan.

### **3.1. Permasalahan Bantuan Sosial Sebelum Transformasi Digital**

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsi redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Melalui program bantuan sosial, pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan berpenghasilan rendah agar mampu memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraannya. Namun, sebelum penerapan transformasi digital, pelaksanaan bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas program dan pencapaian tujuan redistribusi pendapatan.

Salah satu permasalahan utama yang sering ditemukan adalah kualitas data penerima bantuan yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir. Widyaningsih, Ruhmaniyati, dan Toyamah [6] menjelaskan bahwa pemutakhiran data kemiskinan yang tidak dilakukan secara berkelanjutan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data yang digunakan pemerintah. Akibatnya, bantuan sosial berpotensi diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria, sementara kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh manfaat dari program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan bantuan sosial tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Manoppo dan Laoh [7] menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sering kali membutuhkan waktu yang cukup panjang karena belum terintegrasinya berbagai sumber data yang digunakan oleh pemerintah. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses penyaluran bantuan menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan keterlambatan distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks ekonomi publik, keterlambatan penyaluran bantuan dapat mengurangi efektivitas fungsi pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama pada saat terjadi tekanan ekonomi.

Selain persoalan data dan administrasi, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan juga masih menjadi tantangan yang cukup serius. Purbaningrum dan Adinugraha [8] menjelaskan bahwa masih terdapat berbagai kasus di mana bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang relatif mampu, sementara sebagian kelompok rentan belum memperoleh bantuan sesuai kebutuhan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tata kelola bantuan sosial masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek identifikasi penerima manfaat dan mekanisme pengawasan program. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka fungsi bantuan sosial sebagai instrumen redistribusi pendapatan akan menjadi kurang optimal karena manfaat program tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok sasaran yang tepat.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya integrasi data antarinstansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program bantuan sosial. Muchsin [9] menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam tata kelola sektor publik di Indonesia adalah masih adanya fragmentasi sistem informasi yang menyebabkan pertukaran data antarinstansi belum berjalan secara optimal. Dalam konteks bantuan sosial, kondisi tersebut dapat menghambat proses identifikasi penerima bantuan dan memperbesar kemungkinan terjadinya duplikasi maupun inkonsistensi data. Keterbatasan integrasi data juga dapat memengaruhi kualitas perencanaan dan evaluasi program sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang responsif terhadap kondisi masyarakat.

### 3.2. Transformasi Digital dalam Kebijakan Bantuan Sosial

Transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat. Kehadiran teknologi digital tidak hanya mengubah mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong perubahan pada tata kelola program secara keseluruhan. Transformasi ini menjadi penting karena berbagai permasalahan yang selama ini muncul dalam sistem konvensional, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi bantuan, serta lemahnya integrasi data, memerlukan solusi yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

Salah satu bentuk transformasi digital yang dilakukan pemerintah adalah pemanfaatan sistem informasi dan basis data terintegrasi dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial. Ezrananda dan Mukhlis [10] menjelaskan bahwa implementasi bantuan sosial digital mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat. Digitalisasi memungkinkan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih sederhana dan terukur. Dengan demikian, pemerintah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi penerima bantuan serta memantau pelaksanaan program secara real time.

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, transformasi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Rahim dan Maharudin [11] menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik memberikan peluang yang lebih besar bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan. Dalam konteks bantuan sosial, transparansi menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem digital memungkinkan setiap tahapan penyaluran bantuan terdokumentasi dengan lebih baik sehingga risiko penyimpangan maupun manipulasi data dapat diminimalkan.

Transformasi digital juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola sektor publik melalui pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Ciancarini, Giancarlo, dan Grimaudo [12] menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses kerja, pengelolaan data, dan penguatan kapasitas organisasi. Dalam pelaksanaan bantuan sosial, pemanfaatan data yang lebih akurat memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data yang tersimpan secara digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok prioritas penerima bantuan, mengevaluasi efektivitas program, serta merancang kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran.

Keberhasilan transformasi digital juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan dan mengadopsi teknologi secara berkelanjutan. Irfan dan Anirwan [13] menjelaskan bahwa faktor organisasi, sumber

daya manusia, dan kesiapan teknologi menjadi unsur penting dalam keberhasilan transformasi digital layanan publik. Oleh karena itu, digitalisasi bantuan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai pengadaan teknologi baru, melainkan sebagai proses perubahan yang melibatkan sistem kerja, kompetensi aparatur, dan budaya organisasi. Tanpa kesiapan yang memadai pada aspek tersebut, manfaat transformasi digital tidak akan dapat dirasakan secara optimal.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, transformasi digital dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk memperbaiki berbagai kelemahan sistem bantuan sosial konvensional. Melalui pemanfaatan teknologi, integrasi data, dan penguatan tata kelola organisasi, pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, transformasi digital menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas kebijakan bantuan sosial sekaligus memperkuat pelaksanaan fungsi redistribusi pendapatan di Indonesia.

### 3.3. Peran Transformasi Digital dalam Memperkuat Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam ekonomi publik yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan redistribusi, pemerintah berupaya mengalokasikan kembali sumber daya ekonomi agar kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendapatan dapat memperoleh dukungan yang memadai. Dalam pelaksanaannya, bantuan sosial menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, efektivitas redistribusi pendapatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang membutuhkan.

Transformasi digital memberikan peluang yang lebih besar bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas redistribusi pendapatan melalui penguatan sistem pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial. Dengan sistem digital yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan terkini. Khoirul [14] menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan redistribusi pendapatan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kebijakan publik yang diterapkan pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa redistribusi pendapatan tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan redistribusi pendapatan.

Selain meningkatkan ketepatan sasaran, transformasi digital juga mampu mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sistem digital memungkinkan proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Kondisi tersebut memberikan manfaat yang signifikan terutama pada situasi darurat, ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam waktu yang cepat. Dengan adanya sistem yang lebih responsif, pemerintah dapat menjalankan fungsi perlindungan sosial secara lebih optimal sehingga dampak ketimpangan ekonomi dapat ditekan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lassa, Nappoe, dan Sulisty [15] yang menjelaskan bahwa keberhasilan program bantuan tunai sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, integrasi data, dan koordinasi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam konteks bantuan sosial digital, tata kelola yang baik memungkinkan distribusi bantuan dilakukan secara lebih efektif sehingga manfaat program dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memberikan perubahan pada aspek teknologi, tetapi juga memperkuat sistem kelembagaan yang mendukung keberhasilan redistribusi pendapatan.

Lebih lanjut, Sumayyah dan Riofita [4] menjelaskan bahwa redistribusi pendapatan yang efektif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi ekonomi publik. Dalam konteks transformasi digital, peningkatan efektivitas tersebut tercermin melalui kemampuan pemerintah dalam mengurangi kesalahan sasaran, mempercepat distribusi bantuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, manfaat kebijakan redistribusi pendapatan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

### 3.4. Peran Sumber Daya Manusia dan Platform Digital dalam Efektivitas Bantuan Sosial

Keberhasilan transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan kualitas platform digital yang mendukung pelaksanaan program. Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem berbasis teknologi untuk mempercepat pelayanan publik, efektivitas implementasinya tetap bergantung pada kemampuan aparatur dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Oleh karena itu,

transformasi digital perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan aspek teknologi dan manusia secara bersamaan.

Riofita [16] menjelaskan bahwa pemberdayaan digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan individu maupun organisasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks bantuan sosial, pemberdayaan digital diperlukan agar aparat pemerintah mampu mengelola data penerima bantuan secara lebih efektif, melakukan verifikasi secara akurat, serta memanfaatkan sistem digital dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial berbasis digital.

Selain aspek teknologi dan kualitas platform digital, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan transformasi digital. Kepercayaan publik memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi yang diterapkan pemerintah dalam berbagai layanan publik. Riofita [17] menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan pengguna menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi layanan berbasis digital. Kepercayaan tersebut memengaruhi kesediaan masyarakat untuk menerima, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks bantuan sosial, kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan penggunaan data pribadi, proses verifikasi penerima bantuan, serta mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan secara elektronik. Apabila masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem yang digunakan pemerintah, maka proses transformasi digital akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan secara efektif. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menghambat pemanfaatan layanan digital meskipun teknologi yang digunakan telah memadai.

Di sisi lain, kualitas platform digital juga memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas pelaksanaan bantuan sosial. Riofita [18] menjelaskan bahwa optimalisasi platform digital mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan pengguna, serta mempercepat proses penyampaian informasi. Dalam program bantuan sosial, platform digital yang terintegrasi memungkinkan pemerintah mengelola data penerima bantuan secara lebih sistematis dan mempermudah proses pemantauan program. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan program sosial.

Hubungan antara sumber daya manusia dan platform digital bersifat saling melengkapi. Platform digital yang modern tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sebaliknya, sumber daya manusia yang berkualitas juga akan menghadapi berbagai kendala apabila sistem yang digunakan tidak mampu mendukung kebutuhan pelayanan secara efektif. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial memerlukan keseimbangan antara pengembangan kompetensi manusia dan penguatan infrastruktur teknologi.

### 3.5. Tantangan Implementasi Transformasi Digital Bantuan Sosial

Meskipun transformasi digital memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan bantuan sosial, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kehadiran teknologi digital memang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, namun keberhasilan implementasinya tidak dapat dicapai secara instan. Berbagai faktor seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, integrasi data, serta kesiapan organisasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan transformasi digital di Indonesia.

Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya akses terhadap infrastruktur digital di berbagai wilayah. Rahim dan Maharudin [11] menjelaskan bahwa transformasi digital pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketimpangan infrastruktur teknologi dan akses internet antardaerah. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat digitalisasi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, keterbatasan infrastruktur dapat menghambat proses pendataan, verifikasi, maupun distribusi bantuan sehingga efektivitas program menjadi kurang optimal.

Selain faktor infrastruktur, integrasi data antarinstansi pemerintah juga masih menjadi tantangan yang cukup kompleks. Muchsin [9] menjelaskan bahwa fragmentasi sistem informasi dan belum optimalnya integrasi data sektor publik menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan tata kelola digital yang efektif. Dalam pelaksanaan bantuan sosial, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan data antarinstansi sehingga proses identifikasi penerima bantuan menjadi kurang akurat. Akibatnya, risiko terjadinya duplikasi data maupun ketidaktepatan sasaran masih dapat ditemukan meskipun sistem yang digunakan telah berbasis digital.

Tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi transformasi digital. Wijaya, Noersyahbani, dan Zerrer [19] menjelaskan bahwa perubahan menuju layanan publik berbasis digital memerlukan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi yang digunakan. Tidak seluruh penerima bantuan sosial memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama, terutama kelompok lanjut usia, masyarakat berpendidikan rendah, atau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses teknologi terbatas. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui edukasi dan pendampingan yang memadai, maka transformasi digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam akses terhadap layanan sosial.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan organisasi dan sumber daya manusia dalam mengelola perubahan. Irfan dan Anirwan [8] menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam mengadopsi sistem baru dan mengelola perubahan secara berkelanjutan. Dalam program bantuan sosial, aparat pemerintah dituntut untuk memiliki kompetensi digital yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Tanpa kesiapan sumber daya manusia yang baik, sistem digital yang telah dikembangkan tidak akan mampu memberikan manfaat secara optimal.

Selain itu, aspek keamanan dan perlindungan data juga menjadi isu yang semakin penting dalam era digital. Program bantuan sosial melibatkan data pribadi masyarakat dalam jumlah besar sehingga diperlukan sistem keamanan yang mampu melindungi informasi tersebut dari risiko penyalahgunaan maupun kebocoran data. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dikelola. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber dan tata kelola data menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses transformasi digital bantuan sosial.

### 3.6. Implikasi Transformasi Digital terhadap Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan fungsi redistribusi pendapatan di Indonesia. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem bantuan sosial konvensional, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi bantuan, dan lemahnya integrasi data, berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah melakukan pengelolaan data penerima bantuan secara lebih akurat dan terintegrasi. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap ketepatan sasaran program karena bantuan dapat lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Khoirul [9] menjelaskan bahwa keberhasilan redistribusi pendapatan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dengan adanya sistem digital yang mendukung pengelolaan data secara lebih baik, peluang terjadinya kesalahan sasaran dapat diminimalkan sehingga manfaat bantuan sosial menjadi lebih optimal.

Selain meningkatkan ketepatan sasaran, transformasi digital juga memberikan implikasi terhadap efisiensi pelaksanaan kebijakan publik. Proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu relatif panjang dapat dilakukan secara lebih cepat melalui sistem digital yang terintegrasi. Efisiensi tersebut tidak hanya menguntungkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat karena bantuan dapat diterima dalam waktu yang lebih singkat. Dalam konteks ekonomi publik, kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lassa, Nappoe, dan Sulisty [15] yang menjelaskan bahwa efektivitas program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, integrasi data, dan koordinasi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Transformasi digital memberikan peluang untuk memperkuat berbagai aspek tersebut sehingga program bantuan sosial dapat berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memperbaiki proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan sosial secara keseluruhan.

Di sisi lain, transformasi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Ciancarini, Giancarlo, dan Grimaudo [12] menjelaskan bahwa transformasi digital sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan tata kelola organisasi, pengelolaan data, dan mekanisme pengawasan. Dalam konteks bantuan sosial, transparansi yang lebih baik dapat mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperkuat legitimasi kebijakan redistribusi pendapatan.

Namun demikian, manfaat transformasi digital tidak akan tercapai secara optimal apabila berbagai tantangan implementasi masih belum dapat diatasi. Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta permasalahan keamanan data tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem bantuan sosial berbasis digital. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan keamanan sistem yang digunakan.

Secara keseluruhan, transformasi digital telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat fungsi redistribusi pendapatan melalui peningkatan ketepatan sasaran, efisiensi pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas program bantuan sosial. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, digitalisasi menunjukkan potensi yang besar untuk mendukung terciptanya sistem bantuan sosial yang lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan. Dengan pengelolaan yang tepat, transformasi digital dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial berperan penting dalam memperkuat redistribusi pendapatan di Indonesia. Digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data penerima bantuan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Kondisi tersebut mendukung peningkatan ketepatan sasaran program sehingga manfaat bantuan sosial dapat diterima secara lebih efektif oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan sosial, transformasi digital juga memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola kebijakan publik dan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur digital, tingkat literasi teknologi masyarakat, serta keamanan data. Oleh karena itu, penguatan aspek teknologi perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola yang baik agar tujuan redistribusi pendapatan dapat tercapai secara lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan.

#### Referensi

- [1] A. Arisyah and H. Riofita "Optimalisasi Kebijakan Ekonomi Publik dalam Mengatasi Eksternalitas, Barang Publik, Redistribusi Pendapatan, dan Penerapan Pajak Progresif," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 260-271, May. 2025.  
<https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4115>
- [2] S. J., "Analisis Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital Kabupaten Sijunjung," *RIGGS*, vol. 4, no. 3, pp. 7688–7696, 2025.  
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3144>
- [3] M. A. Santhia and M. I. J. Lamabelawa "Transformasi Digital di Desa (Bantuan Sosial) di Indonesia," *JATI*, vol. 9, no. 4, pp. 6144-6148, May. 2025.  
<https://doi.org/10.36040.v9i4.13984>
- [4] Y. Sumayyah and H. Riofita, "Efektivitas Redistribusi Pendapatan dalam Optimalisasi Ekonomi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 9, no. 2, pp. 15697–15701, 2025.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28055>
- [5] N. W. Salsabila, "Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Tinjauan dari Persepsi Mahasiswa dan Masyarakat", *karimahtauhid*, vol. 4, no. 8, pp. 5507-5513, Aug. 2025.  
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20134>
- [6] D. Widyaningsih, Ruhmaniyati, and N. Toyamah, "Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan dan Berkualitas: Pembelajaran dari Studi Kasus di Enam Daerah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 3, no. 2, pp. 179-200, Dec. 2023.  
<https://doi.org/10.55981/jep.2023.1013>
- [7] E. V. Manoppo and N. A. Laoh, "Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Konstituen*, vol. 4, no. 1, Nov. 2022.  
<https://doi.org/10.33701/jk/v4i1.2598>
- [8] A. Purbaningrum and H. Adinugraha, "Transformasi Kebijakan Publik Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Pringsurat untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik," *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, vol. 15, No. 2, pp. 31-44, Oct. 2024.  
<https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i2.116>
- [9] M. Muchsin, "Digital Governance dan Tantangan Integrasi Data Sektor Publik: Studi pada Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi Papua," *JIIA*, vol. 15, no. 2, Dec. 2025.  
<https://doi.org/10.33592/jiia.v15i2.7872>
- [10] D. Ezrananda and I. Mukhlis, "Implementasi dan Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial Digital di Era Ekonomi Digital (Studi Kasus di Dinas Sosial Pemkot Batu)," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pendidikan*, vol. 4, no. 1, Jan. 2024.  
<https://doi.org/10.17977/um066v4i12024p3>
- [11] A. Rahim and D. Maharudin, "Tren Riset Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2019–2025: Tinjauan Literatur Sistematis", *J.Alz*, vol. 4, no. 3, pp.11-22, May. 2025.  
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5176>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10091>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [12] P. Ciancarini, R. Giancarlo, and G. Grimaudo, "Digital Transformation in the Public Administrations," *Administrative Sciences*, vol. 2, May. 2023.  
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.05551>
- [13] M. Irfan and Anirwan, "Kajian Literatur: Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Transformasi Digital Layanan Publik di Indonesia," *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025.  
<https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i3.659>
- [14] F. A. A. Khoirul, "Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan di Indonesia," *Ind. J. Pol. Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 1-10, Apr. 2024.  
<https://doi.org/10.15642/ijps.2024.4.1.1-10>
- [15] J. A. Lassa, G. E. Nappoe, and S. B. Sulisty, "Creating an Institutional Ecosystem for Cash Transfer Programming," *Journal of Social Policy and Administration*, Feb. 2022.  
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.04811>
- [16] H. Riofita, "Developing Digital Empowerment Programs to Enhance the Marketing Performance of Private Islamic Higher Education Institutions," *Muslim Business and Economics Review*, vol. 1, no. 2, pp. 257–280, 2022.  
<https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.70>
- [17] H. Riofita, "Is MyPertamina a Solution or Problem Maker? Developing Customer Trust To Answer" *JSTPM*, vol. 16, no. 2, pp. 279-299, Oct. 2023.  
<https://doi.org/10.1108/JSTPM-09-2022-0161>
- [18] H. Riofita, "Optimalisasi Platform Digital Sebagai Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan UMKM," *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, vol. 6, no. 3, Jul. 2024.  
<https://journalversa.com/s/index.php/ime/article/view/2381>
- [19] I. M. A. Wijaya, P. Noersyahbani, and N. Zerrer, "Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat Perdesaan akibat Digitalisasi Layanan Publik," *J. Ilmu Sos. Hum.*, vol. 2, no. 3, pp. 89-96, Aug. 2024.  
<https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i3.413>